

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan permasalahan yang disebabkan karena kurangnya gizi (malnutrisi) pada balita secara kronis yang dipicu oleh tidak tercukupinya asupan gizi pada rentang waktu yang cukup lama. Hal ini berdampak kepada tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Kekurangan gizi terjadi saat di dalam kandungan dan pada saat awal setelah kelahiran seperti pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tetapi, stunting umumnya baru terlihat jika anak telah berusia 2 tahun.<sup>1</sup> Tingkat stunting di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 27,67%. Angka tersebut tentu masih tergolong tinggi, karena *World Health Organization* (WHO) memberikan toleransi kurang dari 20%.<sup>2</sup>

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terjadinya stunting pada awal kehidupan anak dapat mengakibatkan adanya kerusakan secara permanen pada perkembangan kognitif yang diikuti oleh perkembangan intelektual dan motorik anak yang kurang optimal. Maka, hal ini dapat berdampak kepada pendapatan, pendidikan, dan produktivitas pada masa

---

<sup>1</sup> Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Cet. Pertama. Hlm: 5. Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2017. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku\\_Ringkasan\\_Stunting.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku_Ringkasan_Stunting.pdf).

<sup>2</sup> Fitria Farisa Chusna. 'Terawan: Angka Stunting Di Indonesia Lebih Tinggi Dari Ambang Batas WHO'. *Nasional.Kompas.com*. 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/19/17020401/terawan-angka-stunting-di-indonesia-lebih-tinggi-dari-ambang-batas-who>.

dewasa sehingga dapat berdampak kepada penurunan ekonomi.<sup>3</sup> Dengan begitu, stunting sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga menciptakan adanya ketimpangan dan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan fakta Internasional memperlihatkan bahwa stunting dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan juga dapat mengurangi tingkat keproduktifan pasar. Hal tersebut dapat berakibat pada hilangnya GDP sebesar 11% dan dapat berdampak pada menurunnya pendapatan pekerjaan dewasa sebesar 20% serta dapat menambah adanya kesenjangan yang berakibat pada menurunnya pendapatan seumur hidup sebesar 10% sehingga dapat menyebabkan adanya kemiskinan secara antar generasi.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan balita mengalami stunting salah satunya yaitu faktor internal keluarga dan lingkungan sekitar seperti tempat tinggal, sarana sanitasi pembuangan kotoran manusia, jenis kelamin balita, dan status ekonomi. Pada sanitasi lingkungan jenis jamban yang bukan leher angsa termasuk jenis jamban yang tidak layak sehingga lebih cenderung mudah terkena *stunting* 1,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan balita dua tahun yang memiliki jamban layak.<sup>5</sup> Selain itu, untuk permasalahan kurang gizi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti, Pengaruh Berat

---

<sup>3</sup> Subandi Sardjoko. *WNPG XI Bidang 5 Penguatan Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi Dalam Penurunan Stunting*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2018.

<sup>4</sup> Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Cet. Pertama. Hlm: 5-6. Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. 2017.

<sup>5</sup> Maya Adiyanti, 'Posyandu dengan Kejadian Stunting Pada Baduta di Indonesia (Analisis Data Riskesdad Tahun 2010)'. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia. 2014. <<http://lib.ui.ac.id/detail?id=20386261&lokasi=lokal>>.

Badan Lahir Rendah (BBLR) pada balita. Balita yang lahir biasanya mempunyai berat badan di bawah standar normal sehingga hal ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting.<sup>6</sup> Faktor selanjutnya yaitu faktor sosial dan ekonomi. Berdasarkan karakteristik sosial ekonomi keluarga yang meliputi pendidikan ibu, status pekerjaan, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu mengenai gizi, serta jumlah anggota keluarga. Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap risiko terkena stunting. Semakin tinggi pendidikan dan semakin sejahtera keluarga, maka semakin kecil prevalensi tingkat stunting. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, perilaku penduduk, kesehatan reproduksi juga ikut berpengaruh terhadap tingkat stunting.<sup>7</sup> Pendidikan ibu sangat berpengaruh terhadap stunting pada balita. Ibu yang berpendidikan rendah cenderung sulit untuk menentukan keputusan terhadap kesehatan dan gizi untuk anaknya dan apabila pendidikan ibu rendah maka ibu akan kurang mampu untuk memahami dan tanggap terhadap pengetahuan tentang gizi. Dengan demikian, terdapat kemungkinan besar adanya salah pola asuh terhadap anak. Tingkat pendidikan orang tua juga berhubungan dengan kesadaran dalam menggunakan fasilitas pelayanan

---

<sup>6</sup> Atikah Rahayu, dkk. 'Riwayat Berat Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia Bawah Dua Tahun *Birth Weight Records with Stunting Incidence among Children under Two Years Old*'. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 10 (2). Hlm: 67. 2015. <<https://media.neliti.com/media/publications/144977-ID-riwayat-berat-badan-lahir-dengan-kejadia.pdf>>.

<sup>7</sup> Trihono, dkk. *Pendek (Stunting) Di Indonesia, Masalah Dan Solusinya*. ed. M Sudomo. Lembaga Penerbit Balitbangkes. Hlm: 126-139. Jakarta: Lembaga Penerbit Balitbangkes. 2015. <<https://doi.org/hrfh>>.

kesehatan.<sup>8</sup> Ibu yang berpendidikan seringkali lebih baik dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, mampu berinteraksi lebih efektif dengan penyediaan layanan medis, dan lebih cenderung mengikuti nasihat dan saran yang diberikan kepada mereka. Selain itu, faktor penyebab *stunting* adalah penghasilan rumah tangga. Perekonomian juga menjadi salah satu faktor penyebab dari *stunting* apalagi jika jumlah anggota keluarga banyak maka, kebutuhan seperti asupan gizi dan bahan makanan kurang terpenuhi. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan peluang untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi, sebaliknya penurunan pendapatan akan menyebabkan penurunan daya beli pangan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.<sup>9</sup> Faktor penyebab selanjutnya yaitu, adanya pengaruh terhadap sanitasi lingkungan sekitar, seperti kebersihan air, kondisi rumah, fasilitas toilet, dll.<sup>10</sup>

Kasus *stunting* di Indonesia yang masih tinggi membuat Indonesia masuk ke dalam peringkat lima besar dunia pada masalah *stunting*, sehingga Pemerintah Pusat melakukan intervensi penurunan *stunting* secara terintegrasi

---

<sup>8</sup> Gladys Apriluana dan Fikawati Sandra. 'Analisis Faktor-Faktor Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara *Analysis of Risk Factors of Stunting Among Children 0-59 Months in Developing Countries and Southeast Asia*'. *Media Litbangkes*. Vol. 28 (4). Hlm: 251-253. 2018. <<https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/mpk/article/view/472/537>>.

<sup>9</sup> Rr Dewi Ngaisyah. 'Hubungan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Kanigoro, Saptosari, Gunung Kidul'. *Jurnal Medika Respati*. Vol. X (4). Hlm: 68. 2015.

<sup>10</sup> Gladys Apriluana dan Fikawati sandra. 'Analisis Faktor-Faktor Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita (0-59 Bulan) di Negara Berkembang dan Asia Tenggara *Analysis of Risk Factors of Stunting Among Children 0-59 Months in Developing Countries and Southeast Asia*'. *Media Litbangkes*. Vol. 28 (4). Hlm: 251-253. 2018.

dengan memprioritaskan kabupaten atau kota dalam penanganan *stunting*.<sup>11</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menambah jumlah kabupaten atau kota yang menjadi prioritas dalam penanganan *stunting*. Pada tahun 2018 Kementerian Kesehatan menetapkan sebanyak 100 kabupaten atau kota yang menjadi prioritas penanganan *stunting*, namun di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 160 kabupaten atau kota yang menjadi prioritas penanganan *stunting*.<sup>12</sup> Di Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa kabupaten atau kota yang menjadi prioritas penanganan *stunting*. Salah satu kabupaten yang menjadi prioritas penanganan *stunting* adalah Kabupaten Pemalang.

Tabel 1. 1 Persentase Stunting di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Prevalensi <i>Stunting</i>	$\Sigma$ Balita <i>Stunting</i>
1.	Cilacap	36,32	54.650
2.	Banyumas	33,49	49.138
3.	Purbalingga	36,75	29.880
4.	Kebumen	33,82	33.611
5.	Wonosobo	41,12	29.037
6.	Klaten	31,29	29.708
7.	Grobogan	54,97	62.847
8.	Blora	55,06	35.861
9.	Demak	50,28	50.780

<sup>11</sup> Bappeda.jatengprov.go.id. 'Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting'. *Bappeda.Jatengprov.go.id*. 2019. <<https://bappeda.jatengprov.go.id/konvergensi-percepatan-penurunan-stunting-di-provinsi-jawa-tengah/>>.

<sup>12</sup> Vania Rossa. 'Kemenkes Tetapkan 160 Kabupaten/Kota Sebagai Prioritas Tangani Stunting'. *Suara.com*. 2019. <<https://www.suara.com/health/2019/01/21/100806/kemenkes-tetapkan-160-kabupatenkota-sebagai-prioritas-tangani-stunting>>.

10.	Pemalang	46,28	57.370
11.	Brebes	43,62	69.201

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2017).

Pemerintah menunjuk sebanyak 1.000 desa yang menjadi prioritas penanganan *stunting*, hal ini dilakukan untuk menekan angka *stunting* di Indonesia. Pada tahun 2018 di Kabupaten Pemalang terdapat 10 desa yang menjadi prioritas penanganan *stunting* diantaranya yaitu, Desa Mandiraja, Wangkelang, Longkeyang, Parunggalih, Kebandungan, Purana, Tambakrejo, Kalirandu, Losari, dan Desa Tumbal.<sup>13</sup> Faktor pendukung adanya fenomena *stunting* di Kabupaten Pemalang yaitu medan desa yang terletak di pinggiran Pantai Utara (Pantura) dan mempunyai struktur wilayah pegunungan sehingga sulit di jangkau serta tingginya angka *stunting* di Kabupaten Pemalang disebabkan karena kesalahan pola asuh orang tua kepada anak. Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang gizi buruk disebabkan karena di zaman sekarang banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sehingga kurang memperhatikan asupan gizi anak dan mengakibatkan anak kekurangan gizi yang dapat menjadi pemicu *stunting*.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

<sup>13</sup> Atmarita, Zahraini Yuni, dan Akim Dharmawa. *Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*. ed. Eka Satriani Sakti. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. 2018.

<sup>14</sup> Ufan Faudhil. 'Kasus Gizi Buruk Dan Stunting Masih Tinggi, Kesalahan Pola Asuh Jadi Penyebab'. *Joglojateng.com*. 2021. <<https://joglojateng.com/2021/04/30/kasus-gizi-buruk-dan-stunting-masih-tinggi-kesalahan-pola-asuh-jadi-penyebab/>>.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, bahwa penanganan *stunting* dapat menggunakan dana desa, hal ini sesuai dengan musyawarah desa. Penanggulangan *stunting* di desa adalah salah satu program prioritas pembangunan desa. Penggunaan dana desa untuk penanggulangan *stunting* dimulai dengan melakukan pemetaan yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap sasaran yaitu masyarakat desa yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukannya penanganan *stunting* secara partisipatif. Selain itu, diadakannya program Rembuk *Stunting* Desa yang melibatkan seluruh *stakeholders* yang ada di desa untuk mengkaji mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanggulangan *stunting* termasuk melakukan hubungan kerja sama dengan dinas yang berkaitan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai bentuk dukungan dalam penanganan *stunting* diantaranya adalah melalui pengadaan kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur desa. Kegiatan tersebut seperti menyediakan makanan-makanan sehat dan bergizi untuk peningkatan gizi pada anak, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) rehabilitasi atau pembangunan, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Bersalin Desa (Polindes), dan terdapat kegiatan lain seperti adanya pembangunan air bersih dan sanitasi. Selain itu, terdapat kegiatan secara intensif yang dilakukan untuk para kader kesehatan masyarakat, melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai gaya hidup bersih dan sehat, melakukan pengelolaan terhadap Balai Pengobatan Desa, pembangunan rumah singgah, menyediakan transportasi yang digunakan untuk

mengantarkan masyarakat dalam mendapatkan pertolongan atau perawatan medis di pelayanan kesehatan yang dapat berupa *ambulance*, mobil, atau jika wilayah desanya berupa perairan dapat disediakan kapal motor, serta menyediakan kebutuhan medis seperti, obat-obatan, vitamin, makanan, dsb.<sup>15</sup>

Tabel 1. 2 10 Desa Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Pemalang dan Jumlah Alokasi Dana Desa

No	Desa	$\Sigma$ Penduduk Miskin	$\Sigma$ Penduduk	Luas Wilayah	$\Sigma$ Penderita Gizi Buruk	Alokasi DD 2017
1	Kalirandu	3.121	8.042	330	9	Rp. 970.500. 000
2	Kebandungan	411	1.955	142	3	Rp. 827.200. 000
3	Longkeyang	774	3.252	486	4	Rp. 890.700. 000
4	Losari	1.260	4.818	253	7	Rp. 861.700. 000
5	Mandiraja	1.626	5.458	536	7	Rp. 895.800. 000
6	Parunggalih	384	803	1.098	2	Rp. 877.400. 000
7	Purana	224	2.156	535	3	Rp. 856.400. 000
8	Tambakrejo	1.433	7.349	515	20	Rp. 918.400. 000

<sup>15</sup> Gemawan Dwi Putra. 'Dana Desa Untuk Penurunan Stunting'. *Indonesiabaik.id*. 2017. <<https://indonesiabaik.id/infografis/dana-desa-untuk-penurunan-stunting>>.



9	Tumbal	1.364	3.703	160	8	Rp. 853.600. 000
10	Wangkelang	755	2.369	362	5	Rp. 854.500. 000
						<b>Rp. 8.806.20 0.000</b>

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Pematang mengeluarkan sebuah peraturan yang berbentuk Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 84 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Pematang. Tujuan dari dibentuknya peraturan ini yaitu untuk menekan prevalensi *stunting* hingga mencapai angka di bawah 18% sampai dengan tahun 2024 yang ditujukan untuk anak-anak yang usianya di bawah dua tahun dan anak-anak yang berusia di bawah lima tahun. Terdapat 10 desa lokus perluasan *stunting*. Desa-desa ini akan ditetapkan sebagai konvergensi setiap program kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya secara berjenjang. Hal ini dilakukan untuk upaya penekanan pencegahan dan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Pematang.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti memilih Desa Longkeyang sebagai lokasi penelitian. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut Bupati melakukan koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor di lingkungan Pemerintah kabupaten seperti organisasi atau lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, sosial atau profesi, bidang usaha,

<sup>16</sup> Jdih.Pematangkab.go.id. 'Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Nomor 84 Tahun 2019'.  
Pematangkab.go.id. Hlm: 5. 2019.  
<[https://jdih.pematangkab.go.id/uploads/Perbup\\_No\\_84\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.pematangkab.go.id/uploads/Perbup_No_84_Tahun_2019.pdf)>.

*stakeholders* lainnya, dan melakukan koordinasi hingga ke kecamatan, desa atau kelurahan.

Tabel 1. 3 Indeks Kesulitan Geografis Desa Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Pemalang

No	Desa	Indeks Kesulitan Geografis
1	Kalirandu	2.859
2	Kebandungan	4.221
3	Longkeyang	5.801
4	Losari	2.529
5	Mandiraja	2.785
6	Parunggalih	5.873
7	Purana	5.487
8	Tambakrejo	3.677
9	Tumbal	2.579
10	Wangkelang	4.366

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Indeks kesulitan geografis menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *stunting* dan menjadi pertimbangan pengalokasian Dana Desa, jika dilihat dari tabel di atas Desa Longkeyang merupakan desa yang mempunyai tingkat kesulitan geografis tertinggi setelah Desa Parunggalih dan Kalirandu. Selain itu, Desa Longkeyang mempunyai struktur wilayah yang unik dengan dikelilingi oleh bentangan pegunungan dan wilayahnya berada di tengah hutan pinus sehingga akses menuju desa cukup sulit untuk dijangkau. Maka, hal tersebut dapat menyebabkan kurang adanya sosialisasi *stunting*, adanya kerentanan pangan yang berpengaruh terhadap gizi masyarakat, sulit dalam menjangkau fasilitas kesehatan, tingginya tantangan terhadap pendidikan

sehingga permasalahan tersebut menjadi faktor pendorong adanya *stunting* pada balita .

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 84 Tahun 2019 mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kualitas dalam penanganan dan pencegahan *stunting* dengan sasaran yang ditujukan guna meningkatkan intervensi penanganan *stunting* seribu hari pertama kehidupan dan meningkatnya intervensi sensitif *stunting*. Adapun strategi yang dilakukan pada ibu hamil dan remaja yaitu dengan cara meningkatkan kualitas Puskesmas dalam menjalankan Puskesmas Manajemen Balita terpadu, meningkatkan suplemen gizi untuk ibu dan remaja yang sedang hamil dan memberikan ASI Eksklusif hingga 6 bulan, meningkatkan mutu Pemberian Tambahan (PMT) pada bayi yang berusia di atas enam bulan, meningkatkan pelayanan nifas dan antenatal, meningkatkan capaian imunisasi pada bayi. Sedangkan strategi untuk meningkatkan intervensi sensitif *stunting* yaitu dengan meningkatkan pelayanan rumah sehat, sanitasi dan air minum, meningkatkan bimbingan konseling terhadap pengasuhan anak, meningkatkan jaminan terhadap perlindungan sosial, meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, dan meningkatkan peran remaja serta posyandu, meningkatkan dalam penggunaan pekarangan untuk dapat menghasilkan bahan makanan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap makanan bergizi seperti gemar untuk mengkonsumsi ikan. Hal tersebut dikarenakan ikan adalah makanan yang kaya akan gizi sehingga sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Kebijakan untuk penanganan dan penanggulangan *stunting* adalah meningkatkan pelayanan pada seribu hari

pertama kehidupan diprioritaskan pada pemberian ASI Eksklusif, kualitas PMT, imunisasi, dan pelayanan antenatal.<sup>17</sup>

Kerjasama antara sektor kesehatan dan non kesehatan sangat diperlukan dalam upaya penekanan dan penanggulangan kasus *stunting*. Bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga semua kalangan masyarakat yaitu dapat berbentuk preventif, promotif, dan kuratif. Penyuluhan mengenai penurunan dan penanggulangan *stunting* yang dilakukan di posyandu juga semakin digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Posyandu dan juga Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu menurunkan dan menanggulangi *stunting*. Posyandu dan Puskesmas melakukan monitoring terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita seperti tinggi badan pada balita sesuai dengan usianya. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi secara dini agar dapat dilakukan penanganan secara medis sesegera mungkin.

Apabila dampak dari pelaksanaan kegiatan kebijakan publik tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan kebijakan telah gagal, namun terkadang juga kebijakan publik tidak secara langsung efektif dalam rentang waktu yang pendek.<sup>18</sup> Dengan masih banyaknya angka kasus *stunting* di Kabupaten

---

<sup>17</sup> Jdih.Pematangkab.go.id. 'Peraturan Bupati Kabupaten Pematang Jaya Nomor 84 Tahun 2019'. *Pematangkab.go.id*. Hlm: V-1 - V-3. 2019. <[https://jdih.pematangkab.go.id/uploads/Perbup\\_No\\_84\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.pematangkab.go.id/uploads/Perbup_No_84_Tahun_2019.pdf)>.

<sup>18</sup> Adriana Rodina Fallo. 'Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Kecamatan Kie'. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*. Vol. 1 (2). Hlm: 4. 2020.

Pemalang maka kemungkinan pengimplementasian kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting* oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang belum optimal salah satunya yaitu di Desa Longkeyang. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2021. Selain itu, permasalahan *stunting* sekarang ini menjadi prioritas nasional bagi Indonesia, maka dari itu penelitiannya lebih menarik dan diharapkan dapat berkontribusi dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Pemalang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hasil pengimplementasian Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan

*stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2021.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tahun 2021.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap penurunan dan penanggulangan *stunting* dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana implementasi kebijakan *stunting* di Kabupaten Pemalang khususnya di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan juga masukan untuk Pemerintah Kabupaten Pemalang agar dapat memberikan informasi dan masukan untuk terus fokus pada pentingnya implementasi rencana tersebut. Selain itu, penelitian ini

juga dapat meningkatkan kemampuan penelitian peneliti guna mewujudkan terwujudnya ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk menambah informasi dan membandingkan penelitian peneliti dengan penelitian lainnya. Selain itu penelitian sebelumnya juga menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti telah memperoleh banyak sekali penelitian teoritis yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya tidak ditemukan penelitian serupa dengan nama yang sama dengan penelitian peneliti. Namun demikian, masih banyak penelitian terkait lainnya yang dapat dijadikan referensi peneliti dan bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Nadia Feryka Probohastuti dan Rengga Aloysius (2019) dengan judul “Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan *Stunting* di Kabupaten Blora. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini berfokus kepada intervensi terhadap gizi sensitif. Hal ini dikarenakan dapat memberikan manfaat yang tentu lebih besar dalam penurunan *stunting*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dalam mengimplementasikan kebijakan intervensi gizi sensitif di Kabupaten Blora belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dikarenakan program-program pemerintah belum terlalu atau kurang memberikan dampak kepada masyarakat di Kabupaten Blora serta masih

terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.<sup>19</sup>

Hermawati dan Sastrawan (2020) dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Lombok Utara”. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif menggunakan metode fenomenologi. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana peran dari dinas kesehatan dan OPD atau lembaga terkait dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang cara penanggulangan *stunting* terintegrasi. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwa program-program yang berkaitan dengan penanggulangan *stunting* secara terintegrasi belum dapat sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan terdapat banyak permasalahan teknis yang terjadi pada saat penyelenggaraan program kegiatan pada masing-masing OPD di lapangan. Pemerintah daerah belum terlalu berperan aktif dalam upaya penanggulangan *stunting* di Kabupaten Lombok Timur.<sup>20</sup>

Iren Ressie Ridua, Gloria Miagina dan Palako Djurubassa (2020) dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam Menanggulangi Masalah *Stunting*”. Metode kualitatif deskriptif dipilih dalam penelitian ini. Dimana penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat beberapa

---

<sup>19</sup> Nadia Feryka Probohastuti, Aloysius Rengga. ‘Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Blora’. *Jurnal Administrasi Publik FISIP UNDIP*. Hlm: 1–16. 2019. <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/24936/22229>>.

<sup>20</sup> Hermawati, Sastrawan. ‘Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Lombok Utara’. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*. Vol 8 (2). Hlm: 48-53. 2020. <<http://jkqh.uniqhba.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/223/131>>.



faktor yang mempengaruhi tingginya *stunting* di Kabupaten halmahera seperti faktor kemiskinan dan tingkat kesadaran akan kesehatan rendah, kesalahan dalam pola asuh yang disebabkan karena menikah pada usia dini. Tidak mampunya masyarakat dalam mencukupi kebutuhan gizi seimbang. Terdapat adanya tantangan dalam pelaksanaan pencegahan dan pencegahan *stunting* yaitu membentuk komitmen dan dukungan bersama antar semua pihak yang terkait dalam prioritas pembangunan gizi seimbang. Selain itu, tindakan yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa intervensi pencegahan *stunting* dapat dilaksanakan di tingkat daerah dan pedesaan secara terintegrasi dan multisektoral. Upaya penanggulanga *stunting* masih belum efektif di Kabupaten Halmahera Timur khususnya di Kecamatan Maba Utara. Hal tersebut disebabkan belum adanya pengumpulan data yang dilakukan secara terintegrasi, sehingga pengidap *stunting* tidak diketahui secara jelas dan pasti masih berbentuk gambaran umum saja. Selain hanya itu, yang perlu diperbaiki kembali yaitu lebih ditingkatkan kembali program kegiatan penanganan agar lebih baik serta perlu adanya kebijakan khusus agar persoalan *stunting* dapat ditangani dengan baik.<sup>21</sup>

Apabila membandingkan dengan penelitian terdahulu, terdapat adanya beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap *stunting*,

---

<sup>21</sup> Rini Archda Saputri. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*. Vol. 2 (2). Hlm: 152–166. 2019. <<https://doi.org/10.36341/jdp.v2i2.947>>.

beberapa faktor penyebab terjadinya *stunting*, dan metode penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu lokasi dan objek penelitian. Peneliti memilih Kabupaten Pemalang dikarenakan menjadi salah satu kabupaten prioritas penanganan *stunting* di Provinsi Jawa Tengah dan kondisi geografis Kabupaten Pemalang yang unik karena mempunyai wilayah dataran rendah dan dataran tinggi. Banyaknya daerah yang mempunyai tingkat kesulitan geografis tinggi menyebabkan tingkat *stunting* di Kabupaten Pemalang juga menjadi tinggi, hal ini dikarenakan tingkat kesulitan geografis menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *stunting* dan menjadi pertimbangan pengalokasian Dana Desa. Sedangkan lokasi penelitian yaitu berada di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dan waktu penelitian akan dilaksanakan di tahun 2022.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tingkatan yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus diimplementasikan agar memiliki tujuan atau dampak yang diinginkan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 1979 dalam Solichin, implementasi yaitu untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan dirumuskan atau ditetapkan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yaitu kejadian dan aktivitas yang terjadi setelah dilegalkannya pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup usaha untuk

mengadministrasikannya ataupun untuk memberikan dampak akibat nyata kepada masyarakat.<sup>22</sup> Implementasi mencakup tindakan oleh beberapa aktor terutama oleh birokrat agar suatu program dapat berjalan. Implementasi kebijakan akan dimulai apabila tujuan dan target sasaran telah ditentukan oleh keputusan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan dan dijalankan oleh bermacam faktor sehingga pada nantinya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Meter dan Horn dalam Wibawa, bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari pemerintah dan juga swasta yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan yang sebelumnya telah ditentukan pada keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.<sup>24</sup> Tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk merubah keputusan menjadi sebuah tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu ataupun dalam rangka meneruskan usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Proses implementasi baru akan terlaksana atau dijalankan sebelum undang-undang atau

---

<sup>22</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Ed. Hutari Fandy. Edisi. 1. Cet. 6. Hlm: 135-136. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

<sup>23</sup> Joko Pramono. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Ed. Sutoyo. Cet. Pertama. Hlm: 4. Surakarta: Percetakan Kurnia. 2020. <[http://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/naskah-A5\\_Joko-Pramono\\_Implementasi-....pdf](http://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf)>.

<sup>24</sup> Samodra Wibawa. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia. Hlm: 15. 1994.

peraturan ditetapkan dan menyediakan biaya yang digunakan untuk mendanai proses implementasi kebijakamn tersebut.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George C. Edward III. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah menurut peneliti teori George C. Edward III mudah untuk dipahami dan lebih cocokk untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang. Model dari proses implementasi kebijakan George C. Edward III menampilkan suatu kerangka kerja yang jelas untuk memahami hubungan atau keterkaitan antara unsur-unsur implementasi kebijakan. Edward III berpendapat bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu<sup>26</sup>:

a) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kebijakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi merupakan aspek dari struktur organisasi. Apabila struktur organisasi terlalu panjang maka akan lebih mengarah untuk melemahkan pengawasan dan menyebabkan

---

<sup>25</sup> Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm: 146-147. 2008.

<sup>26</sup> AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 90-92 2005.

*red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang sulit dan kompleks yang mengakibatkan kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

b) Komunikasi

Kesuksesan dari sebuah implementasi kebijakan mengharuskan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga hal tersebut dapat mengurangi adanya distorsi implementasi. Komunikasi menjadi salah satu faktor krusial yang mempengaruhi implementasi kebijakan karena apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik maka implementasi kebijakan tidak berjalan secara efektif. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan suatu kebijakan dapat dikomunikasikan secara jelas dan akurat sehingga kebijakan dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Jika komunikasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka suatu kebijakan akan jelas sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat. Namun, jika kebijakan tidak mempunyai kejelasan maka masyarakat pun akan lebih sulit memahami. Maka dari itu, komunikasi yang baik diperlukan agar tidak terjadi kesalahan informasi. Apabila terjadi *miss* komunikasi maka dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda pula.

c) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka pelaksanaannya tidak akan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan implementator dan sumber daya keuangan. Terdapat beberapa komponen sumberdaya diantaranya adalah jumlah banyaknya staf atau pelaksana, keahlian yang dimiliki oleh staf atau pelaksana, adanya kejelasan dan keakuratan informasi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan program kegiatan seperti dana, sarana dan prasarana dana, serta adanya kewenangan yang menjamin bahwa kebijakan dapat dilaksanakan sesuai apa yang telah diharapkan.

d) Disposisi

Disposisi adalah karakteristik dan watak yang ada pada seorang implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Begitupun sebaliknya apabila sikap atau sudut pandang yang dimiliki oleh implementator berbeda dengan pengambil kebijakan,

maka dalam proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

### 1.6.2 Konsep Kebijakan Publik

Menurut Eystone dalam Solichin, kebijakan publik adalah “*the relationship of governmental unit to its environment*” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Begitu pula didefinisikan oleh Wilson dalam Solichin, bahwa kebijakan publik merupakan tujuan, tindakan dan juga pernyataan dari pemerintah terkait permasalahan tertentu, langkah-langkah yang sedang atau yang telah diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi). Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam Solichin, mendefinisikan kebijakan publik sebagai pilihan tindakan apa pun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.<sup>27</sup> Penyebutan secara umum istilah “*policy*” atau “kebijakan” digunakan untuk menentukan perilaku seseorang aktor (seperti pejabat, kelompok atau institusi pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat akademis atau ilmiah dan sistematis yang bersangkutan terhadap analisis

---

<sup>27</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Ed. Fandy Hutari. Edisi. 1. Cet. 6. Hlm. 13. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.<sup>28</sup>

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang khas, dalam artian kebijakan publik mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lainnya. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Pada sistem politik modern yang kompleks seperti eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki dsb yaitu orang yang dalam kesehariannya terlibat secara langsung dalam urusan-urusan politik dari sistem politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik menurut David Easton.<sup>29</sup>

### **1.6.3 Konsep *Stunting***

Gizi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pada tumbuh kembang anak yang optimal. Dalam periode emas gizi dan perkembangan anak yang cukup dan seimbang sangat diperlukan. Periode emas dimulai dari anaj masih berada di dalam kandungan hingga usia dua tahun atau yang sering disebut dengan istilah “seribu hari pertama kehidupan

---

<sup>28</sup> Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hlm: 16. 2008.

<sup>29</sup> Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Ed. Hutari Fandy. Edisi. 1. Cet. 6. Hlm: 17-18. 2017.



anak”. Kuraangnya gizi pada periode emas tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah, salah satunya yaitu masalah gagal tumbuh sehingga anak menjadi lebih pendek (*stunting*) dari standar.<sup>30</sup> *Stunting* sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat meningkatkan adanya ketimpangan serta dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Terjadinya *stunting* pada awal kehidupan anak dapat mengakibatkan adanya kerusakan secara permanen pada perkembangan kognitif, yang diikuti oleh perkembangan intelektual dan motorik anak yang kurang optimal. Maka, hal ini dapat berdampak kepada pendidikan, pendapatan dan produktivitas pada masa dewasa sehingga dapat berpeluang untuk menurunkan ekonomi.<sup>31</sup>

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Definisi Konseptual**

Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini bersumber pada teori maupun pemikiran. Definisi dari konsep merupakan definisi secara singkat dari sebuah fakta atau fenomena. Sebelum membahas penelitian ini lebih lanjut untuk menghindari terjadinya pengertian yang berbeda maka peneliti akan menegaskan istilah yang ada dengan tujuan untuk menghindari adanya

---

<sup>30</sup> Mohammad Teja. 'Stunting Balita Indonesia Dan Penanggulangannya'. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. Vol. XI (22). Hlm: 14. 2019.

<sup>31</sup> Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Cet. Pertama. Jakarta Pusat: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pertama. Hlm: 5-6. 2017. <[http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku\\_Ringkasan\\_Stunting.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku_Ringkasan_Stunting.pdf)>.

kesalahpahaman dalam pemaknaan istilah di dalam penelitian ini. Adapun istilah yang akan ditegaskan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1.7.1.1 Implementasi Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>32</sup>

#### **1.7.1.2 Penurunan dan Penanggulangan *Stunting***

Penurunan dan penanggulangan *stunting* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir, menekan, mengurangi, mencegah, adanya *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada balita akibat kurangnya gizi secara kronis pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran.

### **1.7.2 Definisi Operasional**

#### **a. Variabel Sumber Daya**

Variabel sumber daya mempunyai dimensi-dimensi:

- 1) Dimensi Staf atau personil, yaitu tercukupinya jumlah staff atau personil dalam melaksanakan kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.
- 2) Informasi, tercukupinya informasi tentang kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.

---

<sup>32</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Ed. Fandy Hutari. Edisi. 1. Cet. 6. Hlm: 135. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

- 3) Kewenangan, adanya formalitas yang berupa surat dari pejabat yang berkaitan dengan kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.
- 4) Fasilitas, yaitu tersedianya fasilitas untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.

**b. Variabel Komunikasi**

Variabel komunikasi mempunyai dimensi-dimensi:

- 1) Dimensi penyampaian pesan dari atasan ke staf atau personil, yaitu tepat dalam penunjukkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.
- 2) Kejelasan pesan, adanya kejelasan mengenai kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.
- 3) Dimensi konsistensi, yaitu konsisten dalam perintah untuk menjalankan kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.

**c. Variabel Disposisi**

Variabel disposisi mempunyai dimensi-dimensi:

- 1) Dimensi pandangan kelompok, yaitu tidak ada pandangan kelompok yang menghambat dalam proses pengimplementasian kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.
- 2) Dimensi pergantian staf, yaitu perlu adanya pergantian staf apabila tidak dapat menjalankan tugasnya.
- 3) Dimensi insentif, yaitu dapat diukur dengan indikator kepuasan staf dalam tercukupinya honor bagi staf yang mendukung adanya kebijakan penurunan dan penanggulangan *stunting*.

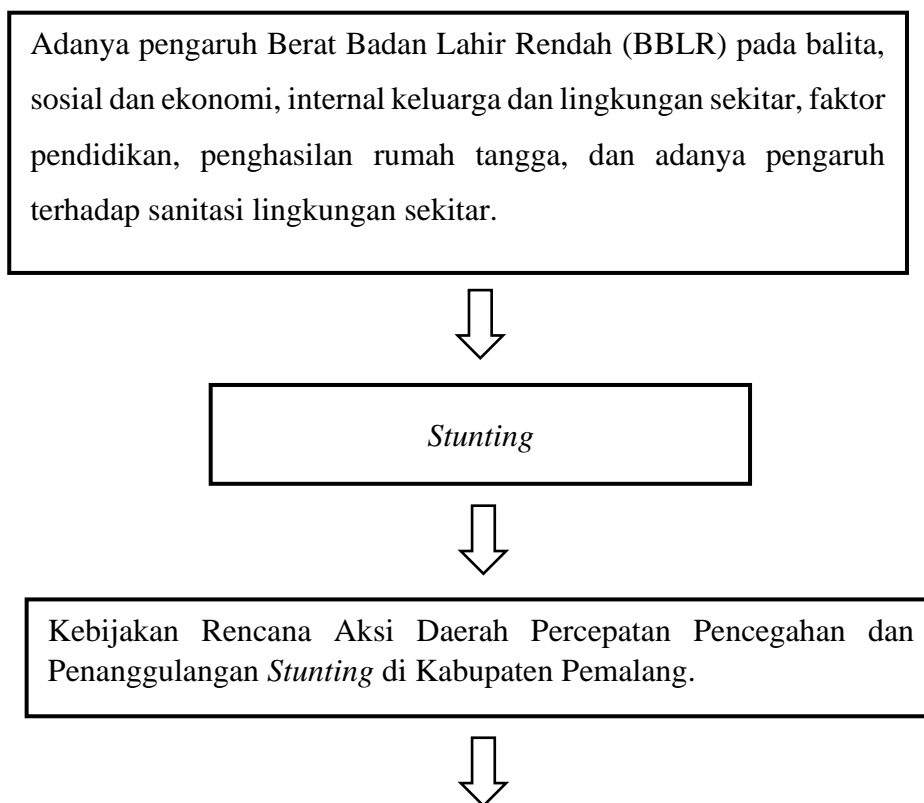
#### d. Variabel Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi mempunyai dimensi-dimensi:

- 1) *Standard Operating Procedure* (SOP), dalam proses pelaksanaan kebijakan tidak ada hambatan di lapangan.

### 1.8 Kerangka Berpikir

Berikut kerangka berpikir dalam penelitian ini:



1. Bagaimana implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang tahun 2021?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang?



Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang pedoman dengan Teori Implementasi G.C Edward III melihat dari:

- 1) Sumberdaya
- 2) Komunikasi
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan menganalisis dan menyelidiki keadaan, kondisi, kejadian dan lain-lain yang hasilnya akan dipaparkan dalam sebuah bentuk laporan. Peneliti menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh,

Kabupaten Pemalang tahun 2021. Penelitian ini merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>33</sup>

### 1.9.2 Lokasi Penelitian

Di dalam penulisan ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pemalang yaitu di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang yang menjadi salah satu desa prioritas penanganan *stunting* di Kabupaten Pemalang. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Longkeyang yaitu karena di Desa Longkeyang belum pernah diadakan penelitian mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mengenai *Stunting* dan faktor geografis sebagai alasan pemilihan lokasi penelitian karena Desa Longkeyang adalah desa terpencil yang merupakan kawasan perbukitan dan pegunungan serta mempunyai indeks kesulitan geografis yang tinggi. Selain itu, Desa Longkeyang adalah desa terdekat dari tempat tinggal peneliti sehingga mudah diakses dan diharapkan agar lebih mudah untuk mendapatkan data.

---

<sup>33</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Cet. XVI. Hlm: 15. Bandung: Alfabeta. 2013.

### 1.9.3 Subjek Penelitian

Di dalam penelitian ini yang akan dijadikan subjek penelitian oleh peneliti adalah:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
2. Petugas Puskesmas Jatiroyom.
3. Perangkat Desa Longkeyang.
4. Masyarakat Desa Longkeyang yang anaknya mengalami *stunting*.

### 1.9.4 Sumber dan Jenis Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dan jenis data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

#### 1.9.4.1 Data Primer

Data primer yaitu sumber data atau informasi yang didapatkan secara langsung dari yang memberikan data kepada pengumpul data. Sumber aslinya atau dari orang yang langsung bersangkutan. Data yang didapatkan atau dikumpulkan langsung berasal dari subjek peneliti dengan menggunakan alat pengambilan atau alat pengukur data langsung diperoleh dari subjek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari dan dibutuhkan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
2. Petugas Puskesmas Jatiroyom.

---

<sup>34</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. Hlm: 308. 2014.

3. Perangkat Desa Longkeyang.
4. Masyarakat Desa Longkeyang yang anaknya mengalami *stunting*.

#### **1.9.4.2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berguna sebagai pelengkap dari data primer. Dalam mendapatkan sumber data penelitian, data sekunder diperoleh dengan cara tidak langsung yaitu melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>35</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumen peraturan, catatan harian ataupun yang berasal dari internet. Menurut Hasan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dari orang yang telah melakukan penelitian dari sumber yang telah ada.<sup>36</sup>

### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

#### **1.9.5.1 Observasi**

Observasi adalah teknik atau cara pengumpulan data atau informasi terkait dengan pelaku, aktivitas, tempat (ruang), peristiwa, perasaan dan juga waktu. Dalam melaksanakan sebuah observasi

---

<sup>35</sup> Muhammad Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa. Hlm: 80. 2012.

<sup>36</sup> M Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm: 82. 2002.



terdapat peranan utama yaitu untuk menemukan hubungan atau interaksi yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan masing-masing subjek penelitian yaitu dengan melihat kesehariannya secara langsung dan mengamati segala hal yang dapat dijadikan sebuah data.

### **1.9.5.2 Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan informan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan guna untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi-informasi secara lisan dengan saling mengobrol dan tatap muka dengan peneliti dan seseorang yang memberikan sebuah informasi.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mencari dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021.

---

<sup>37</sup> Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm: 158. 2014.

### 1.9.5.3 Dokumentasi

Menurut Riyanto, dokumentasi adalah sebuah metode yang digunakan sebagai pelengkap dari metode observasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang mempunyai arti barang tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat data-data yang telah ada. Dokumentasi biasanya berupa gambar. Sebuah tulisan atau catatan, hasil notulensi rapat, dan lain sebagainya.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yaitu data hasil dari wawancara serta hasil dari penelitian di Desa Longkeyang yang menjadi desa prioritas penanganan *stunting* dan data dari Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya mengenai program-program mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam penurunan dan penanggulangan *stunting*.

### 1.9.5.4 Studi Pustaka

Studi pustaka dimana dalam teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber kepustakaan. Studi pustaka dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, mencatat, membaca, dan mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa studi pustaka yang didapatkan melalui jurnal, penelitian terdahulu, buku, literatur terkait dan lain-lain yang

---

<sup>38</sup> Yatim Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC. Hlm: 103. 2010.

berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam penurunan dan penanggulangan *stunting* di Desa Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021.

### **1.9.6 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

#### **1.9.6.1 Analisis Data**

Reduksi data adalah meringkas, memilih hal yang menjadi inti, berfokus kepada hal penting yang berkaitan dengan topik penelitian, mencari tema pada pola yang pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan untuk memudahkan pengumpulan data berikutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data adalah proses berpikir kritis yang membutuhkan kecerdasan dan pendalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk memilih, mempertajam, memfokuskan, menyingkirkan dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hlm: 247-249. 2018.

### 1.9.6.2 Penyajian Data

Merupakan suatu aktivitas ketika terdapat sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk *tabel*, *flowchart*, bagan, teks naratif, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut data dapat tersusun, terorganisasikan dalam pola sebuah hubungan sehingga mudah untuk dipahami.<sup>40</sup>

### 1.9.6.3. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan yaitu dapat menjawab semua rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tetapi tidak mungkin juga tidak karena seperti yang telah disebutkan bahwa pertanyaan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan masih dapat berubah atau berkembang setelah penelitian di lapangan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran atau uraian suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti agar menjadi jelas.<sup>41</sup> Masalah penelitian akan terjawab pada

---

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hlm: 249. 2018.

<sup>41</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hlm: 252-253. 2018.

hasil dan pembahasan sekaligus terangkum secara jelas dan tepat pada kesimpulan.